

Evaluasi Kritis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Penanggulangan Ketimpangan Sosial (*A Critical Evaluation of the North Sumatra Provincial Government in Addressing Social Inequality*)

Juliadi Zurdani Harahap^{1*}, Syukur Kholil²

Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara^{1,2}

juliadi4004243016@uinsu.ac.id¹, syukurkholil@uinsu.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 17 Oktober 2024

Revisi 1 pada 21 Oktober 2024

Revisi 2 pada 19 November 2024

Revisi 3 pada 10 Desember 2024

Revisi 4 pada 12 Desember 2024

Revisi 5 pada 13 Desember 2024

Disetujui pada 16 Desember 2024

Abstract

Purpose: This study aims to critically evaluate the North Sumatra Provincial Government's strategies in addressing social inequality using the Stimulus-Organism-Response (SOR) model, focusing on how policies are formulated and implemented to tackle disparities in income, education, healthcare, and infrastructure access.

Research methodology: The research employs a qualitative approach, using case studies and in-depth interviews with key informants from government institutions, such as Bappeda, the Department of Social Affairs, and the Department of Education. Secondary data, including official reports and statistics from the Central Bureau of Statistics (BPS), is also analyzed. The data is processed through qualitative content analysis to identify key themes related to the government's response to social inequality.

Results: The study reveals critical challenges in addressing social inequality in North Sumatra. Political interference emerges as a significant barrier, with evidence showing how local political interests often distort resource allocation, particularly in rural districts. For instance, social assistance programs frequently prioritize areas with stronger political connections, leading to systematic exclusion of the most vulnerable communities. Logistical challenges further compound these issues, with remote mountainous and coastal regions experiencing severe difficulties in accessing social services. The research demonstrates that uneven resource allocation is not merely a distribution problem but a systematic failure rooted in complex political and administrative mechanisms that perpetuate existing social disparities.

Limitations: The study's scope is limited to North Sumatra Province, and the findings may not be fully generalizable to other regions with different socio-economic contexts. Additionally, the reliance on qualitative data, such as interviews and document analysis, introduces the risk of subjective bias from informants and limited access to comprehensive quantitative data.

Contribution: This research provides actionable insights for policymakers by identifying specific systemic barriers to addressing social inequality. The findings suggest the need for more transparent resource allocation mechanisms, independent oversight of social assistance programs, and targeted interventions in marginalized communities. By exposing the intricate challenges in policy implementation, the study offers a framework for developing more equitable and responsive social development strategies in North Sumatra and potentially other Indonesian provinces.

Keywords: *Social Inequality, Public Policy, Stimulus-Organism-Response (SOR) Model, Government Strategy*

1. Pendahuluan

Ketimpangan sosial merupakan fenomena yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan sosial menjadi isu yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, ekonomi, politik, dan sosial (Wahyudi & Asy'ariati, 2022). Sumatera Utara, salah satu provinsi terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Indeks Gini di Sumatera Utara mencapai 0,326, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Sejarah pembangunan di Indonesia, yang sering kali berpusat di wilayah perkotaan, turut memperburuk kondisi ini. Ketimpangan sosial di Sumatera Utara dapat ditelusuri hingga periode kolonial, ketika kebijakan ekonomi lebih banyak mendukung eksploitasi sumber daya di daerah tertentu tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan lokal. Pasca-kemerdekaan, kebijakan pembangunan nasional yang cenderung bersifat sentralistik juga memperparah kesenjangan antarwilayah. Faktor-faktor seperti alokasi anggaran yang tidak merata, dinamika politik lokal, dan lemahnya kapasitas institusi daerah memperburuk kondisi ketimpangan sosial di Sumatera Utara.

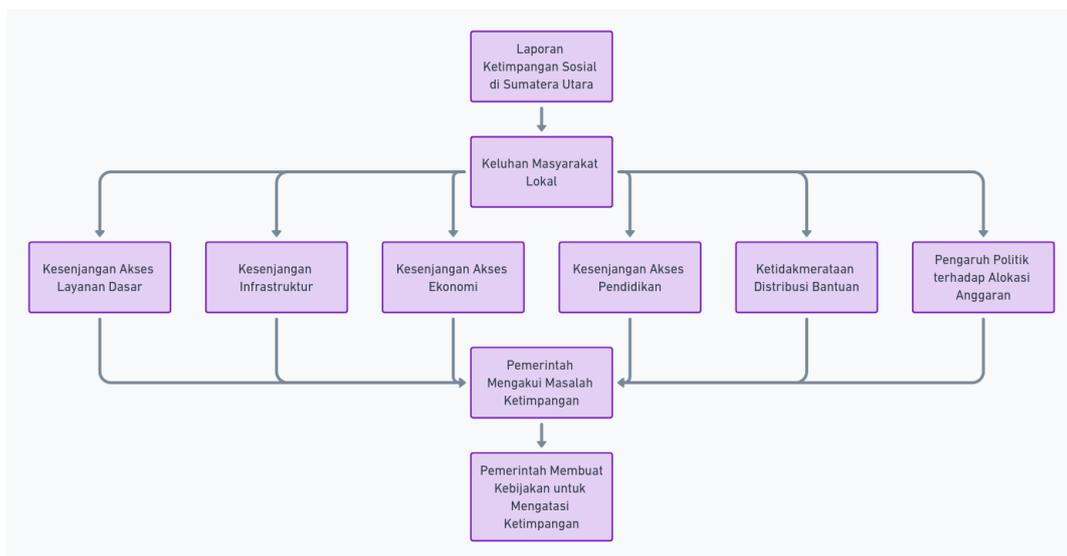
Peran pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan sosial sangat krusial karena memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya (Bui et al., 2023; Fan et al., 2021). Program seperti bantuan sosial, peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang merata dirancang untuk mengurangi kesenjangan ini (Ezeudoka & Fan, 2024; Huang et al., 2023; Upadhyay & Kamble, 2023). Namun, efektivitas program-program tersebut masih memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat ketidaksesuaian antara alokasi dana bantuan sosial dan tingkat kebutuhan masyarakat di beberapa kabupaten, yang memperburuk ketimpangan antarwilayah (Frisda Anintya et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendekatan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi ketimpangan sosial (Hesse et al., 2021; Jin et al., 2024).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Stimulus-Organism-Response (SOR) untuk memahami bagaimana kebijakan penanggulangan ketimpangan sosial di Sumatera Utara dirumuskan dan diimplementasikan (ÇELİK, 2023; Mehmood et al., 2024). Teori SOR menjelaskan bahwa rangsangan (stimulus), seperti data ketimpangan sosial dan tekanan masyarakat, memengaruhi bagaimana pemerintah (organism) merespons isu tersebut melalui kebijakan yang diambil (respons). Stimulus yang diterima oleh pemerintah berupa fakta-fakta mengenai ketimpangan sosial dan kebutuhan masyarakat menjadi pemicu untuk merespons dalam bentuk kebijakan. Namun, dinamika internal seperti proses politik, anggaran, dan prioritas sering kali memengaruhi bagaimana stimulus ini diproses (Azhar et al., 2023; Kholil et al., 2021).

Stimulus dalam konteks ini mencakup data tentang ketimpangan sosial, tekanan dari kelompok masyarakat, dan fakta lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Utara bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan daerah-daerah terpencil memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan dasar. Organism dalam model ini adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang memproses stimulus tersebut melalui lembaga-lembaga pemerintahan terkait, termasuk Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, untuk merumuskan kebijakan yang diharapkan mampu merespons isu ketimpangan. Proses ini melibatkan analisis kebijakan, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan evaluasi anggaran untuk menentukan prioritas program (Marfuah et al., 2021).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah merespons rangsangan berupa data ketimpangan dan tekanan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pendekatan SOR, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diluncurkan dalam merespons ketimpangan sosial di Sumatera Utara. Misalnya, program Bantuan Sosial Terpadu telah diluncurkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi distribusi program ini tidak merata, terutama di daerah terpencil. Menemukan bahwa program pemerintah sering kali gagal menjangkau kelompok sasaran yang tepat karena tidak adanya penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal.

Tantangan lain yang dihadapi dalam proses respon kebijakan adalah adanya dinamika politik lokal (Alim, 2022; Budi et al., 2020; Feng et al., 2021). Kebijakan yang seharusnya merespons kebutuhan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang mempengaruhi bagaimana stimulus tersebut diproses. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah benar-benar mampu merespons masalah ketimpangan sosial secara efektif. Ketimpangan sosial yang tinggi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, teori SOR memberikan kerangka yang jelas untuk menganalisis bagaimana pemerintah memproses rangsangan berupa data ketimpangan dan aspirasi masyarakat, serta apakah respon yang dihasilkan cukup efektif dalam mengatasi masalah yang ada.



Gambar 1. Identifikasi Masalah Ketimpangan Di Sumatera Utara

Tantangan utama dalam penerapan kebijakan yang responsif terhadap ketimpangan sosial di Sumatera Utara adalah ketidakmerataan alokasi anggaran antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Seperti disebutkan dalam wawancara dengan seorang pejabat di Dinas Keuangan Sumatera Utara, "anggaran pembangunan cenderung lebih difokuskan di perkotaan, sementara daerah pedesaan sering kali kekurangan anggaran untuk infrastruktur dan layanan dasar." Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di berbagai wilayah, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan sosial.

Dengan menggunakan teori SOR, penelitian ini berusaha mengevaluasi apakah respon yang diambil oleh pemerintah telah mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari stimulus juga menjadi faktor penting dalam teori ini, di mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih berhasil karena lebih responsif terhadap kebutuhan mereka (Nugroho, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mengevaluasi bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara merespons ketimpangan sosial menggunakan pendekatan

Stimulus-Organism-Response (SOR). Model SOR menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk memahami hubungan antara data ketimpangan sebagai stimulus, pemerintah sebagai organism, dan kebijakan sebagai respons. Penelitian ini tidak hanya menyoroti efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga mengidentifikasi hambatan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Masalah penelitian yang menjadi fokus adalah sejauh mana kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu merespons secara efektif ketimpangan sosial yang ada, khususnya dalam aspek distribusi anggaran, pembangunan infrastruktur, serta akses pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan layanan dasar lainnya, serta menganalisis dinamika politik dan sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur kebijakan publik di tingkat provinsi, khususnya di Indonesia, dengan menerapkan pendekatan SOR untuk mengevaluasi respons kebijakan terhadap tantangan sosial-ekonomi yang kompleks.

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.2 Ketimpangan Sosial di Indonesia

Ketimpangan sosial merupakan tantangan utama di Indonesia, terutama dalam konteks distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kesenjangan antarwilayah, di mana daerah perkotaan cenderung lebih maju dibandingkan daerah pedesaan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan (Tadjoeddin, 2013). Selain itu, kebijakan pembangunan yang berpusat di Jawa dan kota-kota besar memperburuk ketimpangan di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera Utara (Kuncoro, 2020). Dalam konteks Sumatera Utara, data menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil seperti wilayah pesisir dan pegunungan masih sangat terbatas (BPS, 2023).

Ketimpangan antarwilayah juga memengaruhi tingkat kemiskinan. Studi oleh Yusuf dan Sumner (2015) menemukan bahwa daerah pedesaan cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Ketimpangan ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana kemiskinan dan kurangnya infrastruktur saling memperburuk satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah dengan memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat di daerah terpencil.

1.2 Pendekatan Stimulus-Organism-Response (SOR) dalam Kebijakan Publik

Pendekatan Stimulus-Organism-Response (SOR) digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana pemerintah memproses informasi terkait ketimpangan sosial dan meresponsnya melalui kebijakan. Model ini sebelumnya telah digunakan dalam berbagai studi kebijakan publik untuk menganalisis respons pemerintah terhadap tekanan sosial dan ekonomi (ÇELİK, 2023). Stimulus dalam konteks ini mencakup data tentang ketimpangan sosial, tekanan masyarakat, dan kebutuhan lapangan. Organism, yaitu pemerintah, memproses stimulus ini melalui mekanisme institusional, seperti diskusi kebijakan, evaluasi anggaran, dan koordinasi antar instansi (Mehmood et al., 2024).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas respons pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti dinamika politik, kapasitas birokrasi, dan ketersediaan sumber daya (Azhar et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, dinamika politik lokal sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan, di mana alokasi anggaran sering dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu (Alim, 2022). Hal ini sesuai dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan adanya distorsi dalam distribusi program bantuan sosial akibat pengaruh politik lokal.

1.3 Tantangan Implementasi Kebijakan dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial

Implementasi kebijakan publik di Indonesia, terutama dalam program-program untuk mengurangi ketimpangan sosial, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Studi oleh Budi et al. (2020)

menunjukkan bahwa faktor seperti ketidakefisienan birokrasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan independen adalah kendala utama dalam keberhasilan program bantuan sosial. Misalnya, program bantuan sosial sering kali gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan akibat kurangnya data yang akurat dan mekanisme distribusi yang efektif (Feng et al., 2021).

Dalam konteks Sumatera Utara, salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan alokasi anggaran antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Seperti yang dicatat oleh Huang et al. (2023), daerah-daerah terpencil sering kali diabaikan dalam perencanaan pembangunan, meskipun memiliki kebutuhan yang lebih mendesak. Ketimpangan ini diperburuk oleh infrastruktur yang buruk dan keterbatasan aksesibilitas, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan (BPS, 2023).

Ketimpangan sosial tidak hanya menjadi isu di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di Asia Tenggara. Studi oleh Upadhyay dan Kamble (2023) menunjukkan bahwa negara-negara seperti Filipina dan Vietnam menghadapi tantangan serupa, di mana daerah pedesaan sering tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, beberapa negara berhasil mengurangi ketimpangan melalui program redistribusi yang efektif, seperti pendidikan gratis di pedesaan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Studi ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk memperbaiki kebijakan redistribusi dengan memastikan alokasi sumber daya yang lebih adil.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur kebijakan publik di Indonesia dengan fokus pada penerapan teori SOR dalam mengevaluasi respons pemerintah terhadap ketimpangan sosial. Dengan menyoroti tantangan-tantangan spesifik, seperti pengaruh politik lokal dan ketidakmerataan alokasi sumber daya, penelitian ini menawarkan wawasan yang relevan untuk mengembangkan strategi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Perbandingan dengan studi dari wilayah lain di Asia Tenggara juga menambah dimensi internasional yang memperkaya diskusi tentang solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial.

2. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merespons masalah ketimpangan sosial menggunakan teori Stimulus-Organism-Response (SOR) (Torres-Soriano, 2023; Werling, 2020; Zhang et al., 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses kebijakan yang kompleks dan dinamis dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi tertentu. Metode studi kasus dipilih karena memberikan kerangka kerja yang kaya untuk memahami fenomena spesifik di lingkungan yang terdefinisi dengan baik, yaitu kebijakan pemerintah terkait ketimpangan sosial di Sumatera Utara. Pendekatan ini relevan untuk mengidentifikasi hubungan antara stimulus (data ketimpangan dan tekanan masyarakat), proses internal pemerintah sebagai organism, dan kebijakan yang dihasilkan sebagai respons. Selain itu, pendekatan kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi aspek-aspek kontekstual yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan keterwakilan pihak-pihak yang memiliki wawasan langsung dan mendalam tentang proses perumusan dan implementasi kebijakan. Informan utama terdiri dari pejabat pemerintah daerah, seperti dari Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, serta anggota DPRD dan tokoh masyarakat. Kriteria pemilihan informan mencakup keterlibatan langsung dalam proses kebijakan, pengalaman kerja atau posisi strategis yang relevan, serta kemauan dan kemampuan untuk memberikan wawasan yang rinci. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan.

Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci menggunakan pedoman semi-terstruktur. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali tema-tema yang muncul selama diskusi. Wawancara bertujuan untuk memahami bagaimana stimulus, seperti tekanan publik atau data ketimpangan, diproses oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan. Semua

wawancara direkam dengan izin informan, kemudian ditranskrip untuk dianalisis. Sumber data sekunder meliputi dokumen kebijakan, laporan tahunan pemerintah, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik terkait. Dokumen ini dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan yang diterapkan dengan data ketimpangan sosial yang ada.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan stimulus, proses internal (organism), dan respons kebijakan. Tema-tema tersebut kemudian dikategorikan dan dibandingkan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data, seperti hubungan antara tekanan masyarakat dan alokasi anggaran. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumen resmi, dan statistik untuk memastikan validitas dan keandalan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana pemerintah memproses data dan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi ketimpangan sosial di Sumatera Utara.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada keunggulannya dalam menggali konteks lokal dan nuansa dari proses kebijakan yang kompleks. Meskipun pendekatan kuantitatif atau campuran dapat memberikan generalisasi data yang lebih luas, pendekatan kualitatif lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap mekanisme internal pengambilan kebijakan (He et al., 2022). Keunggulan pendekatan ini meliputi kemampuannya untuk menggali perspektif subjektif informan dan memahami hubungan sebab-akibat yang kompleks. Namun, penelitian ini menyadari keterbatasan pendekatan kualitatif, seperti potensi bias interpretasi dan keterbatasan generalisasi temuan. Untuk mengatasi ini, dilakukan triangulasi data dan transparansi dalam pelaporan proses penelitian. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dirumuskan dan diimplementasikan dalam merespons ketimpangan sosial.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Analisis Stimulus: Identifikasi Masalah Ketimpangan Sosial di Sumatera Utara

Ketimpangan sosial di Sumatera Utara menjadi isu yang mendesak untuk ditangani, terutama setelah menerima berbagai keluhan dan laporan dari masyarakat serta pemangku kepentingan di tingkat lokal. Salah satu informan utama dari Bappeda Sumatera Utara mengungkapkan bahwa "Kami terus mendapatkan laporan dari berbagai wilayah tentang adanya ketimpangan yang signifikan, terutama antara daerah perkotaan seperti Medan dengan daerah terpencil seperti Nias dan Tapanuli." Informasi ini menjadi stimulus bagi pemerintah untuk mengakui bahwa masalah ketimpangan sosial tidak dapat diabaikan lagi dan harus segera diatasi dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat dari Deli Serdang juga mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah-daerah pedesaan merasa semakin terpinggirkan. "Kami di desa merasa akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat sulit dibandingkan dengan orang-orang di kota. Anak-anak kami harus menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bisa sekolah," jelasnya. Keluhan ini menyoroti kesenjangan besar dalam akses layanan dasar, yang menjadi salah satu stimulus kuat bagi pemerintah provinsi untuk segera merespons kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang terpinggirkan.

Di bidang kesehatan, seorang dokter yang bertugas di puskesmas di Kota Medan memberikan gambaran lebih jelas tentang ketimpangan yang terjadi. "Fasilitas kesehatan di sini sangat terbatas, banyak pasien yang harus menunggu lama karena kekurangan tenaga medis dan peralatan. Bahkan untuk kondisi darurat pun, kami sering kali tidak memiliki peralatan yang cukup," ungkapnya. Kondisi ini mencerminkan stimulus nyata yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil yang infrastrukturnya kurang memadai.

Selain itu, kesenjangan dalam infrastruktur juga menjadi salah satu isu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Seorang kepala desa di wilayah Samosir menyatakan, "Jalan-jalan di desa kami sangat

buruk, terutama saat musim hujan. Hal ini membuat kami sulit untuk mengakses pasar atau layanan kesehatan." Masalah infrastruktur yang tidak memadai ini menciptakan isolasi bagi masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Di sisi lain, ketimpangan dalam akses pendidikan menjadi keluhan utama dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Seorang pejabat dari dinas ini mengungkapkan, "Kami sering kali menerima laporan bahwa sekolah-sekolah di daerah pedesaan kekurangan guru dan fasilitas. Ini menjadi masalah besar karena anak-anak di daerah terpencil tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota." Kesenjangan dalam penyediaan layanan pendidikan ini menjadi stimulus yang jelas bagi pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan akses pendidikan di daerah-daerah tertinggal.

Tekanan dari masyarakat terkait ketimpangan ini juga semakin besar. Seorang aktivis dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberdayaan masyarakat di Kota Medan menyatakan, "Kami sudah sering kali mengajukan permohonan kepada pemerintah agar ada kebijakan yang lebih adil untuk daerah pedesaan, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk pembangunan. Namun, sering kali perhatian lebih banyak diberikan ke kota-kota besar." Keluhan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah, dan ini menjadi stimulus yang penting dalam proses pengambilan kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan sosial.

Selain keluhan terkait akses layanan dasar, beberapa pengusaha kecil di wilayah pedesaan juga mengeluhkan kurangnya akses terhadap peluang ekonomi yang setara. Salah satu pemilik usaha kecil di Deli Serdang mengatakan, "Kami di desa merasa tidak mendapat dukungan yang sama seperti yang diterima pengusaha di kota. Kami kekurangan akses modal dan jaringan pemasaran, sementara usaha-usaha di kota mendapatkan berbagai insentif." Kesenjangan dalam peluang ekonomi ini menunjukkan adanya stimulus tambahan yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam kebijakan penanggulangan ketimpangan sosial.

Salah satu pejabat di Dinas Sosial Sumatera Utara juga menjelaskan bahwa mereka sering menerima aduan terkait ketidakmerataan distribusi bantuan sosial. "Banyak daerah terpencil yang mengeluhkan bahwa mereka jarang mendapatkan bantuan sosial secara tepat waktu atau dalam jumlah yang memadai," ungkapnya. Ketidaksesuaian distribusi ini menjadi salah satu bentuk ketimpangan yang merugikan masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil, dan menjadi stimulus yang memicu pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan.

Faktor politik juga memengaruhi stimulus yang diterima oleh pemerintah terkait ketimpangan sosial. Seorang anggota DPRD Sumatera Utara mengakui bahwa sering kali daerah-daerah yang memiliki kekuatan politik lebih besar mendapatkan alokasi anggaran yang lebih baik. "Daerah perkotaan seperti Medan memang cenderung mendapatkan perhatian lebih karena memiliki pengaruh politik yang lebih kuat. Hal ini membuat daerah-daerah yang lebih kecil merasa terabaikan," ujarnya. Tekanan politik ini menjadi salah satu stimulus yang perlu diatasi oleh pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata.

Dari berbagai wawancara ini, jelas terlihat bahwa stimulus berupa data dari masyarakat, tekanan kelompok sipil, dan laporan dari berbagai lembaga pemerintah mengenai ketimpangan sosial telah memberikan tekanan besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tantangan yang dihadapi tidak hanya mencakup masalah distribusi ekonomi, tetapi juga akses layanan dasar yang tidak merata, infrastruktur yang buruk, serta ketidakadilan dalam distribusi anggaran dan peluang. Dengan semua stimulus ini, menjadi jelas bahwa respons yang tepat sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah ketimpangan sosial yang kompleks di Sumatera Utara.

3.2 Proses Organism: Respon Internal Pemerintah Terhadap Masalah Ketimpangan Sosial

Respon internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap masalah ketimpangan sosial di wilayah ini mencerminkan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga terkait. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) memainkan peran sentral dalam memproses informasi mengenai ketimpangan yang diterima dari masyarakat, survei, serta data statistik resmi. Menurut hasil wawancara dengan seorang pejabat Bappeda, "Kami memulai dengan memetakan data ketimpangan, baik dari

aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kemudian berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk merumuskan kebijakan yang bisa mengatasi masalah ini." Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda berfungsi sebagai penghubung utama antara data yang masuk dengan kebijakan yang diusulkan.

Dalam proses internal ini, Dinas Sosial berperan sebagai salah satu lembaga utama yang bertugas untuk menangani distribusi bantuan dan program-program sosial. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, mendapatkan akses yang adil terhadap berbagai program bantuan sosial. "Kami sering kali dihadapkan dengan masalah distribusi yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil," kata salah satu pejabat Dinas Sosial. Hal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dinas dalam merespons ketimpangan yang berakar dari keterbatasan infrastruktur dan akses geografis.

Sementara itu, Dinas Pendidikan memproses data yang menunjukkan kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seorang pejabat Dinas Pendidikan mengungkapkan, "Kami terus menerima keluhan tentang kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil, serta minimnya fasilitas pendidikan yang layak di beberapa wilayah." Proses internal di Dinas Pendidikan melibatkan evaluasi distribusi guru dan fasilitas, serta upaya untuk mengatasi tantangan geografis yang membuat beberapa daerah sulit dijangkau. Ini menjadi dasar bagi mereka dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif.

Respon pemerintah terhadap ketimpangan sosial di Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat lokal. Tekanan dari aktor-aktor politik, terutama dari daerah-daerah perkotaan yang memiliki kekuatan politik lebih besar, sering kali memengaruhi prioritas kebijakan yang diambil. Seorang pejabat di DPRD Sumatera Utara mengakui bahwa "Daerah perkotaan seperti Medan cenderung mendapatkan perhatian lebih karena memiliki pengaruh politik yang lebih kuat, sementara daerah-daerah terpencil sering kali kurang mendapat perhatian." Hal ini memperlihatkan bahwa faktor politik memainkan peran penting dalam menentukan alokasi anggaran dan prioritas kebijakan.

Anggaran menjadi faktor kunci lain yang memengaruhi bagaimana pemerintah merespons masalah ketimpangan sosial. Seorang pejabat dari Dinas Keuangan menyatakan bahwa "Anggaran sering kali terbatas, dan ini memaksa kami untuk membuat pilihan-pilihan sulit dalam mengalokasikan sumber daya untuk program-program penanggulangan ketimpangan." Dinamika internal di Dinas Keuangan melibatkan perdebatan tentang bagaimana membagi anggaran antara daerah perkotaan yang memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur besar dan daerah pedesaan yang sangat memerlukan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintahan sering kali menjadi tantangan dalam merespons ketimpangan sosial. Meskipun Bappeda berfungsi sebagai lembaga perencanaan yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, proses koordinasi dengan dinas-dinas terkait tidak selalu berjalan lancar. Seorang pejabat di Bappeda menyatakan bahwa "Kadang-kadang ada kesenjangan komunikasi antara dinas-dinas, yang membuat proses perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi terhambat." Ini menggambarkan bahwa dinamika internal pemerintahan juga mempengaruhi bagaimana respon terhadap ketimpangan sosial dapat dilaksanakan secara efektif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun ada mekanisme untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, banyak kelompok masyarakat sipil merasa bahwa suara mereka tidak sepenuhnya didengar dalam proses kebijakan. "Kami sering kali merasa bahwa pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan," ujar salah satu aktivis dari organisasi masyarakat sipil di Medan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam partisipasi publik yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan yang diambil.

Dalam proses pengambilan keputusan, sering kali terjadi perdebatan internal mengenai prioritas kebijakan. Salah satu pejabat di Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa "Kami sering kali harus

memilih antara membangun infrastruktur di daerah perkotaan yang sangat membutuhkan pembaruan, atau membangun akses jalan di daerah pedesaan yang masih terisolasi." Keputusan-keputusan sulit seperti ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam merespons ketimpangan sosial yang bersifat multidimensional.

Terdapat juga upaya dari pemerintah untuk memperbaiki proses pengambilan kebijakan melalui inovasi-inovasi baru. Salah satu inisiatif yang diambil oleh Gubernur Sumatera Utara adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. "Kami ingin lebih melibatkan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terwakili, dalam proses pengambilan keputusan," ujar seorang pejabat pemerintah. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu pemerintah merespons masalah ketimpangan sosial dengan cara yang lebih inklusif dan partisipatif.

Secara keseluruhan, respon internal pemerintah terhadap masalah ketimpangan sosial di Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika politik, keterbatasan anggaran, serta tantangan koordinasi antar lembaga. Proses pengambilan keputusan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis dan anggaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diambil. Meskipun ada tantangan, upaya untuk memperbaiki proses kebijakan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan inovasi-inovasi kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha merespons masalah ketimpangan sosial dengan cara yang lebih baik.

3.3 Implikasi Kebijakan untuk Penanggulangan Ketimpangan Sosial di Sumatera Utara

Dari hasil analisis dan evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi ketimpangan sosial, terdapat sejumlah implikasi kebijakan yang dapat memberikan solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi.

3.3.1 Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Untuk meningkatkan koordinasi, pemerintah dapat membentuk tim koordinasi lintas sektor yang terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Tim ini dapat bertanggung jawab untuk menyelaraskan program, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan memastikan bahwa setiap dinas memiliki peran yang jelas dalam pelaksanaan program. Selain itu, mekanisme pelaporan yang terintegrasi berbasis digital dapat membantu mempercepat alur komunikasi antar dinas, sekaligus mempermudah pemantauan progres program.

3.3.2 Optimalisasi Alokasi Sumber Daya

Ketimpangan dalam distribusi anggaran antara daerah perkotaan dan pedesaan merupakan tantangan yang perlu segera diatasi. Pemerintah dapat menerapkan sistem alokasi anggaran berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*), yang mempertimbangkan indikator-indikator spesifik seperti tingkat kemiskinan, akses infrastruktur, dan kebutuhan layanan dasar di setiap daerah. Selain itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk daerah terpencil, yang hanya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan dasar di wilayah tersebut.

3.3.3 Solusi untuk Tantangan Logistik di Daerah Terpencil

Masalah logistik dalam distribusi bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil seperti Nias dan Tapanuli dapat diatasi dengan membangun pusat distribusi regional. Pusat ini dapat berfungsi sebagai titik penghubung antara daerah terpencil dan pusat distribusi utama di kota-kota besar. Selain itu, penggunaan teknologi transportasi modern, seperti drone untuk pengiriman bantuan di wilayah dengan akses jalan yang sulit, dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kendala geografis.

3.3.4 Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah dapat mengadopsi mekanisme konsultasi masyarakat secara terstruktur, di mana warga diundang untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah desa atau platform digital.

Selain itu, melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam evaluasi kebijakan dapat membantu memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

3.3.5 Penanganan Tantangan Politik dalam Distribusi Anggaran

Pengaruh politik lokal yang cenderung memprioritaskan daerah dengan kekuatan politik yang lebih besar dapat diminimalisir dengan memperkuat mekanisme pengawasan independen. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal, seperti Ombudsman dan lembaga anti-korupsi, untuk memastikan bahwa distribusi anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penerapan sistem penilaian berbasis kinerja untuk alokasi anggaran dapat mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana yang diberikan.

3.3.6 Penyediaan Insentif untuk Tenaga Kerja di Daerah Terpencil

Salah satu kendala utama dalam sektor pendidikan dan kesehatan adalah kurangnya tenaga pengajar dan medis di daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat memberikan insentif finansial dan non-finansial kepada tenaga kerja yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Insentif tersebut dapat berupa tambahan tunjangan, fasilitas tempat tinggal, atau beasiswa pendidikan untuk keluarga mereka. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan program rotasi tenaga kerja, di mana tenaga pengajar dan medis bertugas di daerah terpencil dalam jangka waktu tertentu sebelum dipindahkan ke lokasi lain.

3.3.7 Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Evaluasi menunjukkan bahwa banyak infrastruktur yang dibangun di daerah terpencil mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan. Pemerintah perlu memperkenalkan program pemeliharaan berkala yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses perawatan infrastruktur. Program ini dapat mencakup pelatihan teknis bagi warga setempat untuk memelihara jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership) untuk memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur.

3.3.8 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif di lapangan, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai pemerintah daerah, yang berfokus pada manajemen program, pengelolaan anggaran, dan penggunaan teknologi untuk mendukung pelayanan publik (Tasyah et al., 2021). Selain itu, peningkatan kapasitas dapat didukung dengan memperkenalkan sistem informasi berbasis data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan berbasis bukti.

3.3.9 Inovasi dalam Teknologi Informasi untuk Kebijakan

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, terutama dalam pengumpulan data dan monitoring program. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital terintegrasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah di wilayah mereka secara langsung. Data yang dikumpulkan dari platform ini dapat digunakan untuk memperbarui kebijakan secara real-time dan memastikan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat (Waruwu et al., 2023).

Meskipun ada berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, beberapa program telah menunjukkan hasil yang positif. Program Pembangunan Desa Terpadu telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Seorang kepala desa di Kabupaten Tapanuli menyatakan bahwa "Program ini membantu kami melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan di desa, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan lokal." Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki potensi untuk lebih berhasil. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan penanggulangan ketimpangan sosial di Sumatera Utara menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Masalah distribusi, koordinasi antar lembaga, dan alokasi anggaran yang tidak merata menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, pemerintah perlu meningkatkan

pengawasan, memperkuat koordinasi, dan lebih memperhatikan kebutuhan lokal dalam setiap program yang diluncurkan.

3.4 Analisis SOR dalam Penanggulangan Ketimpangan di Sumatera Utara

Ketimpangan sosial di Sumatera Utara adalah masalah yang mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Melalui pendekatan Stimulus-Organism-Response (SOR), kita dapat menganalisis bagaimana pemerintah merespons stimulus yang dihasilkan dari data ketimpangan sosial, bagaimana proses internal dalam pemerintah (organism) mengolah stimulus tersebut, serta bagaimana kebijakan yang diterapkan sebagai respons terhadap permasalahan ini. Pendekatan ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis terkait dengan efektivitas kebijakan publik dalam menanggulangi ketimpangan sosial di wilayah tersebut.

Stimulus ketimpangan sosial di Sumatera Utara berasal dari berbagai sumber. Data statistik, seperti Indeks Gini yang menunjukkan kesenjangan pendapatan, merupakan salah satu stimulus utama. Selain itu, laporan-laporan dari masyarakat di daerah-daerah terpencil yang mengeluhkan kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur turut memperkuat kesadaran bahwa ketimpangan sosial perlu segera diatasi. Stimulus ini memaksa pemerintah untuk merespons tantangan yang semakin meningkat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal seperti Nias dan Tapanuli. Stimulus lainnya datang dari tekanan politik dan kelompok masyarakat sipil yang semakin vokal dalam menyuarakan ketidaksetaraan dalam pembangunan.

Setelah stimulus diterima, pemerintah sebagai organisme memproses informasi ini melalui berbagai mekanisme internal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum menjadi lembaga-lembaga kunci yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan penanggulangan ketimpangan sosial. Dalam proses ini, berbagai dinamika politik dan keterbatasan anggaran sering kali menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana stimulus direspons. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan di daerah perkotaan yang padat dengan kebutuhan mendesak di daerah pedesaan yang masih tertinggal. Pada tataran ini, proses internal dalam pemerintah sering kali menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan distribusi sumber daya.

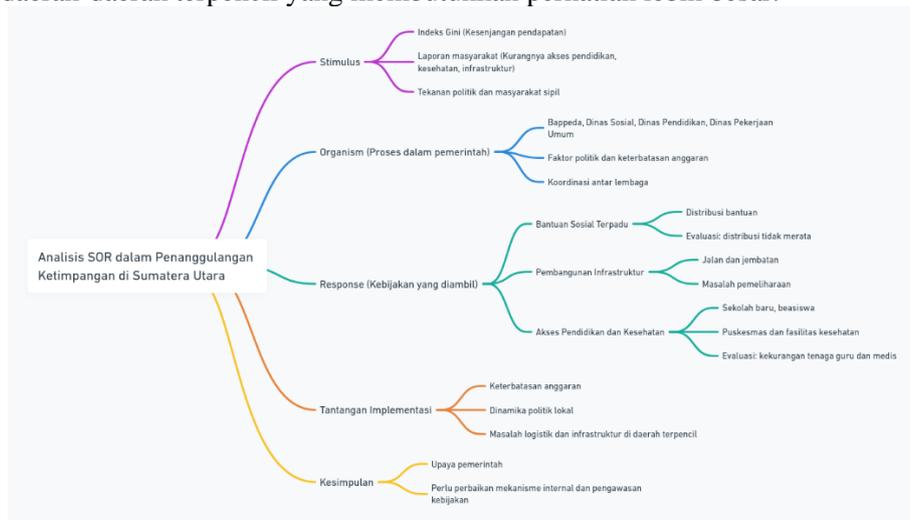
Respons terhadap stimulus ketimpangan sosial tercermin dalam berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program Bantuan Sosial Terpadu menjadi salah satu respons utama dalam mengurangi kesenjangan pendapatan melalui distribusi bantuan langsung tunai dan akses terhadap kebutuhan dasar. Selain itu, pemerintah juga merespons masalah infrastruktur dengan membangun jalan dan jembatan di daerah-daerah terpencil. Namun, evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah terpencil belum mendapatkan bantuan dengan merata karena masalah logistik, dan banyak infrastruktur yang dibangun tidak tahan lama akibat minimnya pemeliharaan.

Selain bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga merespons ketimpangan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah baru didirikan di daerah-daerah pedesaan, dan program beasiswa diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Namun, masalah kekurangan guru di daerah terpencil menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas program ini. Di sektor kesehatan, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya telah dibangun, tetapi kurangnya tenaga medis dan peralatan medis di daerah-daerah terpencil masih menjadi hambatan besar bagi akses kesehatan yang merata.

Di sisi lain, evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di beberapa daerah terpencil telah meningkatkan konektivitas dan mempermudah akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, distribusi bantuan sosial yang tidak merata tetap menjadi masalah yang sering dihadapi. Dalam banyak kasus, bantuan sering kali terlambat atau tidak mencapai daerah-daerah yang paling membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah telah dirancang untuk merespons stimulus ketimpangan sosial, tantangan dalam implementasi di lapangan masih cukup besar.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas respons kebijakan pemerintah. Daerah perkotaan seperti Medan cenderung mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah pedesaan. Ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan memperburuk masalah ketimpangan sosial. Tantangan ini juga diperparah oleh dinamika politik lokal, di mana wilayah yang memiliki kekuatan politik lebih besar sering kali mendapatkan perhatian lebih dibandingkan wilayah-wilayah yang tidak memiliki kekuatan politik yang sama.

Selain itu, meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan kebijakan di lapangan sering kali terbentur masalah teknis, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan keterbatasan tenaga pengajar dan medis. Hal ini menciptakan kesenjangan antara perencanaan kebijakan di tingkat provinsi dan implementasi di tingkat daerah, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih besar.



Gambar 2 Analisis SOR

Kebijakan pembangunan yang diterapkan di Sumatera Utara juga sering kali tidak memperhitungkan kebutuhan lokal secara mendalam. Program-program yang dirancang di tingkat provinsi terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi spesifik di lapangan, sehingga efektivitasnya menjadi terbatas. Misalnya, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil sering kali terhambat oleh kondisi geografis yang sulit, dan kurangnya sumber daya lokal untuk memelihara infrastruktur yang sudah dibangun memperburuk masalah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam merespons ketimpangan sosial di Sumatera Utara melalui berbagai kebijakan, tantangan dalam pelaksanaan di lapangan dan koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala utama. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme internal mereka dalam merespons stimulus ketimpangan sosial, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mengalokasikan anggaran yang lebih merata untuk daerah-daerah terpencil yang paling membutuhkan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran dengan lebih baik. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, analisis SOR terhadap kebijakan penanggulangan ketimpangan sosial di Sumatera Utara menunjukkan bahwa pemerintah telah merespons stimulus yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berupaya mengatasi masalah tersebut. Namun, untuk memastikan bahwa kebijakan ini berhasil secara jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat proses internal mereka dan meningkatkan kemampuan untuk merespons tantangan-tantangan teknis dan logistik yang muncul dalam implementasi kebijakan di lapangan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari evaluasi kritis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan ketimpangan sosial menggunakan teori Stimulus-Organism-Response (SOR) menunjukkan bahwa

ketimpangan sosial merupakan isu multidimensional yang membutuhkan respons yang cepat, terukur, dan berkelanjutan. Stimulus berupa data statistik, tekanan masyarakat, serta laporan tentang ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telah mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi hambatan signifikan, termasuk pengaruh dinamika politik lokal, ketidakseimbangan alokasi anggaran, serta tantangan logistik dalam implementasi kebijakan di daerah terpencil.

Sebagai organism, pemerintah Sumatera Utara memproses stimulus ini melalui lembaga-lembaga seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Meski demikian, proses pengambilan keputusan sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan dinamika politik yang cenderung memprioritaskan daerah perkotaan dibandingkan wilayah terpencil. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan secara merata dan efektif.

Respons kebijakan yang dihasilkan meliputi program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan akses layanan dasar. Beberapa program menunjukkan hasil positif, seperti pembangunan infrastruktur yang berhasil meningkatkan konektivitas di beberapa wilayah terpencil. Namun, evaluasi juga menemukan bahwa distribusi bantuan sosial sering kali tidak merata, infrastruktur yang dibangun kurang dipelihara, dan masalah kekurangan tenaga pengajar atau medis di daerah terpencil tetap menjadi kendala utama. Selain itu, kurangnya adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan lokal membatasi efektivitas program yang diluncurkan.

Untuk memperkaya literatur tentang ketimpangan sosial, penelitian di masa depan dapat berfokus pada mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti perubahan demografi, migrasi, atau digitalisasi dapat memengaruhi ketimpangan sosial. Studi komparatif antara Sumatera Utara dan provinsi lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam menanggulangi ketimpangan sosial. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam tentang dinamika politik dalam pengambilan keputusan kebijakan di tingkat lokal dapat membantu memahami bagaimana pengaruh politik dapat diminimalkan untuk mencapai kebijakan yang lebih adil dan merata.

Kesimpulannya, meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan dalam menanggulangi ketimpangan sosial, upaya ini memerlukan perbaikan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, mekanisme implementasi, dan pengawasan kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, pemerintah dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan sosial di wilayah ini, sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya fokus pada kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi ketimpangan sosial tanpa menelusuri interaksi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang mungkin memengaruhi hasil kebijakan. Selain itu, penelitian ini mengandalkan data kualitatif dari wawancara dan dokumen kebijakan, yang berisiko menghadirkan bias subjektif dari para informan. Batasan lainnya adalah cakupan wilayah yang terbatas pada Sumatera Utara, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk provinsi lain di Indonesia yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi berbeda.

Referensi

- Alim, B. N. (2022). Upaya Mewujudkan Dynamic Governance Pada Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Azhar, A., Kholil, S., & Soiman, S. (2023). Communication Planning of Education Council Managers in Increasing the Quality of Religious Education in The Digital Era in Aceh Tamiang District. *Edukasi Islami*

- Budi, N. F. A., Fitriani, W. R., Hidayanto, A. N., Kurnia, S., & ... (2020). A study of government 2.0 implementation in Indonesia. *Socio-Economic ...*
- Bui, D. T., Vu, T. N., Tran, T. V. H., Duong, C. D., & Le, T. L. (2023). Impact of institutional environment on social entrepreneurial intentions. In *Journal of Open Innovation ...* Elsevier.
- ÇELİK, B. (2023). *Classifying the underlying causes of consumer boycott motivations: An integrative model development based on the SOR (stimulus-organism-response) ...*. researchgate.net.
- Ezeudoka, B. C., & Fan, M. (2024). Exploring the impact of digital distrust on user resistance to e-health services among older adults: the moderating effect of anticipated regret. In *Humanities and Social Sciences ...* nature.com.
- Fan, M., Huang, Y., Qalati, S. A., Shah, S. M. M., & ... (2021). Effects of information overload, communication overload, and inequality on digital distrust: A cyber-violence behavior mechanism. In *Frontiers in ...* frontiersin.org. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.643981>
- Feng, G. F., Yang, H. C., Gong, Q., & Chang, C. P. (2021). What is the exchange rate volatility response to COVID-19 and government interventions? *Economic Analysis and Policy*.
- Frisda Anintya, V., Rantika, S., Fitriyani, Y., Yusdanissa Arismunandar, F., & Zakiyah, S. (2021). Evaluasi, perubahan dan kontinuitas kebijakan: studi kasus kebijakan Pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.160>
- He, M., Liu, B., Song, Y., & Li, Y. (2022). Spatial stigma and environmentally responsible behaviors during the pandemic: The moderating role of self-verification. *Tourism Management Perspectives*.
- Hesse, A., Niederle, F., Schön, L., & ... (2021). Consumer responses to brand communications involving COVID-19. *Journal of Marketing ...* <https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.2000008>
- Huang, F., Li, S., Ding, H., Han, N., & Zhu, T. (2023). Does more moral equal less corruption? The different mediation of moral foundations between economic growth and corruption in China. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03735-2>
- Jin, P., Yu, L., Ahmad, K., Shafique, H. M., & ... (2024). Evaluating the factors influencing the adoption of digital culture among university students in developing areas of South Punjab. *Information ...* <https://doi.org/10.1177/02666669241270909>
- Kholil, S., Nasution, H., & Amini, N. R. (2021). Organizational Communication Model On The Implementation Of The Sakinah 'Aisyiyah Family'sumatera Utara. In ... *Research And Critics ...* pdfs.semanticscholar.org.
- Marfuah, M., Cempaka, S., Risdan Ardiansyah, A., Rahmawati, L., Yunia Rediana, M., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.184>
- Mehmood, K., Jabeen, F., Iyanna, S., & ... (2024). Exploring drivers of behavioral willingness to reduce plastic consumption and socially responsible consumption behavior: a stimulus–organism–behavior *Corporate Social ...* <https://doi.org/10.1002/csr.2731>
- Tasyah, A., Septiya, S., Jasriyani Putri, S., Agung Fernanda, R., & Chesilia Azani, P. (2021). Best Practice Kebijakan E-government dalam Mengimplementasikan Pelayanan Publik di Era New Normal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 21–33. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.163>
- Torres-Soriano, M. R. (2023). The role of honeypots and sabotage in state-based operations against online jihadism, 2001-2020. *Terrorism and Political Violence*. <https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2050221>
- Upadhyay, N., & Kamble, A. (2023). Examining Indian consumer pro-environment purchase intention of electric vehicles: Perspective of stimulus-organism-response. *Technological Forecasting and Social Change*.
- Wahyudi, H., & Asy'ariati, F. A. (2022). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 143–155. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1412>
- Waruwu, W. M., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2023). Optimalisasi E-Government pada Kawasan Free Trade Zone di Kota Batam. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), 49–57. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i1.1874>
- Werling, A. E. (2020). *The Impact of Covid-19 on the German Online Home Sports Industry: An*

Analysis Based on SOR and Structural Equation Modeling. search.proquest.com.

Zhang, J., Islam, M. S., Jambulingam, M., Lim, W. M., & ... (2024). Leveraging environmental corporate social responsibility to promote green purchases: The case of new energy vehicles in the era of sustainable development. In *Journal of Cleaner ...* Elsevier.